



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6397-6404

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Kinerja DPRD Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis

Fakhtiar Qadri<sup>1✉</sup>, Ali Yusri<sup>2</sup>, Zulkarnaini<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: [fakhtiar.qadri6876@grad.unri.ac.id](mailto:fakhtiar.qadri6876@grad.unri.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang salah satunya korupsi dana bantuan sosial pada tahun 2017 dimana melibatkan anggota DPRD beserta mantan bupati dan kepala bagian keuangan, serta turut melibatkan dari kalangan legislator. Hal ini tentunya mempengaruhi kepuasan masyarakat atas kinerja DPRD secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan melibatkan 400 orang sampel yang berasal dari setiap Kecamatan di Bengkalis. Data dianalisis secara kuantitatif dengan analisis uji korelasi pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja DPRD Bengkalis dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan mendapatkan total skor sebesar 7.742 tergolong baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kinerja DPRD Bengkalis secara keseluruhan mendapatkan Skor SKM 77 terletak pada interval 62,51-81,25 dengan nilai mutu pelayanan B sehingga tergolong memuaskan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja DPRD terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis. Hasil uji korelasi pearson menunjukkan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau  $0,870 > 0,112$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Besar pengaruh antara kinerja DPRD terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis sebesar 75,8%

Kata kunci : *Kinerja DPRD, Indeks Kepuasan Masyarakat*

## Abstract

This research was motivated by the many cases, one of which was corruption in social assistance funds in 2017 which involved members of the DPRD, former regents and heads of finance, as well as involving legislators. This certainly affects public satisfaction with the DPRD's overall performance. The aim of this research is to determine the Community Satisfaction Index (IKM) on the performance of the Bengkalis Regency DPRD. The type of research used was quantitative involving 400 samples from each sub-district in Bengkalis. Data were analyzed quantitatively using Pearson correlation test analysis. The research results show that the overall performance of the Bengkalis DPRD in carrying out its legislative, budget and supervisory functions received a total score of 7,742 which is considered good. The Community Satisfaction Index (IKM) regarding the performance of the Bengkalis DPRD as a whole gets an SKM score of 77, located in the interval 62.51-81.25 with a service quality score of B so it is classified as satisfactory. There is a significant influence between the performance of the DPRD on the Bengkalis Regency Community Satisfaction Index (IKM). The results of the Pearson correlation test show that the calculated  $r$  value  $> r$  table or  $0.870 > 0.112$  with a significant value of  $0.000 < 0.05$ . The magnitude of the influence between DPRD performance on the Bengkalis Regency Community Satisfaction Index (IKM) is 75.8%

Keywords: *Community Satisfaction Index, DPRD performance*

## PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang diemban oleh DPRD menjadi landasan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, peran DPRD tidak selalu dianggap efektif oleh masyarakat, seperti yang terungkap dalam berbagai survei. Tingkat kepuasan terhadap kinerja legislatif cenderung rendah, dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan beberapa tantangan, seperti ketidakakuratan produk legislasi, keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta kurangnya efektivitas dalam merepresentasikan kepentingan masyarakat.

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif menuntut transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan yang baik dari DPRD. Survei kepuasan masyarakat dapat menjadi salah satu metode untuk mengevaluasi kinerja dan meningkatkan pelayanan publik, termasuk di dalamnya kerja Sekretariat DPRD. Dalam konteks ini, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Sekretariat DPRD juga menjadi aspek yang krusial. Standar pelayanan, penanganan pengaduan, dan ketersediaan sarana serta prasarana menjadi elemen-elemen yang perlu diperhatikan. Perlu ada perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan

masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan demokrasi di tingkat daerah.

Sebagai suatu lembaga pemerintahan, DPRD memiliki tanggung jawab besar terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui upaya-upaya perbaikan kinerja, penguatan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan, diharapkan DPRD dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi strategisnya untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas di tingkat daerah. DPRD Kabupaten Bengkalis memiliki total 45 anggota yang terbagi dalam 10 fraksi, dengan mayoritas anggota laki-laki. Partai Golkar dan PKS menjadi fraksi dengan jumlah anggota terbanyak. Data JDIH DPRD menunjukkan jumlah peraturan daerah dan keputusan yang dikeluarkan dalam rentang tahun 2016-2022.

Kinerja DPRD memiliki dampak penting pada kepuasan masyarakat, tercermin dalam representasi kepentingan masyarakat, legitimasi lembaga, pengaruh pada proses demokrasi, dan hubungan dengan pemerintah daerah. Penelitian menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap DPRD, dengan beberapa persepsi negatif terkait kepentingan pribadi, mobilisasi massa, dan kualitas anggota DPRD. Penyimpangan yang melibatkan Ketua DPRD pada tahun 2017, terkait dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial, memberikan dampak negatif pada persepsi masyarakat terhadap kinerja DPRD. Selain itu, kurangnya layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui situs web resmi DPRD juga menjadi kendala. Oleh karena itu, perbaikan kinerja DPRD perlu dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas anggota DPRD. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperkuat peran DPRD sebagai lembaga representatif yang efektif.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan filosofi numerik atau statistik. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh dan hubungan antara kinerja DPRD dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilaksanakan di Kantor DPRD Bengkalis, dipilih karena eksistensinya yang belum optimal. Sampel penelitian sebanyak 400 orang dipilih dengan menggunakan teknik *proportional stratified random sampling* dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Data primer terbatas pada tanggapan masyarakat terhadap kinerja DPRD dan kepuasan masyarakat, sementara data sekunder mencakup profil Kabupaten Bengkalis dan DPRD Bengkalis. Analisis data melibatkan uji deskriptif kuantitatif,

uji kualitas instrumen seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Uji hipotesis mencakup uji korelasi dan uji koefisien determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji deskriptif kuantitatif, kinerja DPRD Bengkalis dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan mendapatkan total keseluruhan skor sebesar 7.742, yang tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap kinerja DPRD dalam membentuk Perda, pembahasan RAPBD, dan pengawasan kebijakan mayoritas berada pada kategori baik hingga sangat baik. Selanjutnya, dalam aspek kepuasan masyarakat, pengukuran menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kenyamanan dan keamanan dari kinerja DPRD Bengkalis dapat dikategorikan sebagai "Memuaskan". Hal ini diperoleh dari tanggapan positif terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan fungsi pengawasan, perwujudan teknologi informasi, dan fungsi legislasi yang memberikan keamanan.

Dari wawancara dengan anggota DPRD Bengkalis, terungkap bahwa transparansi, partisipasi publik, responsivitas terhadap isu masyarakat, serta perlindungan hak asasi dan integritas menjadi faktor kunci dalam membangun kenyamanan dan keamanan masyarakat terhadap kinerja DPRD. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa DPRD Bengkalis telah melakukan upaya untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, memastikan transparansi, partisipasi, dan responsivitas, sehingga memberikan kepuasan pada aspek kenyamanan dan keamanan. Dalam konteks ini, kinerja DPRD Bengkalis dianggap memadai dan dapat dijadikan dasar untuk terus meningkatkan interaksi positif antara DPRD dan masyarakat.

Kinerja DPRD Bengkalis dalam aspek personal attention (perhatian pribadi), problem-solving approach (pendekatan pemecahan masalah), dan fairness (keadilan) mendapatkan nilai yang memuaskan. Dalam perhatian pribadi, mayoritas responden merasa sangat puas dengan perhatian DPRD terhadap aspirasi dan harapan masyarakat, dengan nilai SKM mencapai 82,25 atau kategori "Sangat Memuaskan." Pendekatan pemecahan masalah juga mendapat penilaian yang memuaskan, dengan layanan informasi dan tanggapan terhadap keluhan masyarakat dinilai sangat memuaskan oleh mayoritas responden. Nilai SKM sebesar 79,25 menempatkan kinerja DPRD pada kategori "Memuaskan."

Sementara itu, aspek keadilan juga mendapat penilaian positif, terutama dalam hal akuntabilitas dan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan nilai SKM sebesar 77,25, kinerja DPRD dalam hal keadilan dinilai "Memuaskan." Langkah-langkah konkret seperti mendengarkan aspirasi masyarakat, berkomunikasi secara efektif, turun lapangan,

dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait menjadi faktor penting dalam menciptakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Bengkalis. Aspek tanggungjawab keuangan (fiscal responsibility) mendapat penilaian positif dari mayoritas masyarakat. Pengawasan anggaran dan transparansi keuangan dianggap sangat memuaskan, meskipun terdapat isu kekecewaan terkait keterbatasan DPRD dalam fungsi pengawasan akibat adanya regulasi yang membatasi aksi mereka.

Di sisi lain, aspek pengaruh masyarakat (citizen influence) menunjukkan ketidakpuasan mayoritas responden. Penilaian kurang memuaskan muncul terutama terkait kepercayaan publik dan adanya forum layanan kritik dan saran. Isu utama yang muncul adalah terkait rekrutmen anggota DPRD dan kualitas pemilihan umum, yang dapat memengaruhi kecerdasan pemilih. Dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD Bengkalis, disarankan adanya peningkatan transparansi dan keterbukaan terkait pengawasan anggaran guna mengatasi isu kekecewaan masyarakat. Selain itu, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas rekrutmen calon anggota DPRD dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, perbaikan pada aspek-aspek ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD Bengkalis sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja DPRD Kabupaten Bengkalis, hasil menunjukkan skor SKM sebesar 77 dengan nilai mutu pelayanan B, sehingga dapat dikategorikan sebagai memuaskan. Secara rinci, aspek-aspek seperti kenyamanan, keamanan, perhatian pribadi, pendekatan pemecahan masalah, keadilan, dan tanggung jawab keuangan dinilai memuaskan atau sangat memuaskan. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Bengkalis menjadi indikator utama keberhasilan wakil rakyat. Diperoleh pandangan bahwa responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, partisipasi yang inklusif, dan pengambilan keputusan yang adil dan transparan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepuasan tersebut.

Rekomendasi yang dapat diambil adalah memastikan DPRD Bengkalis tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan tanggapan yang cepat dan solutif. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memastikan representasi kepentingan yang baik. Dengan demikian, DPRD dapat memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan warga Bengkalis.

Hasil uji kualitas instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Kinerja DPRD dinyatakan valid, karena nilai corrected item-total correlation lebih besar dari  $r_{tabel}$  0,30. Selain itu, uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki nilai yang memadai untuk dianggap reliabel. Uji asumsi klasik pada data, termasuk uji normalitas dan uji linearitas, menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan memiliki hubungan linear. Ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat untuk analisis regresi.

Selanjutnya, uji hipotesis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara Kinerja DPRD dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis. Korelasi antara kedua variabel ini cukup kuat, dengan nilai Pearson Correlation sebesar 0,870. Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa sebesar 75,8% variasi dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dijelaskan oleh Kinerja DPRD, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kinerja DPRD berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis sebesar 75,8%, menandakan pentingnya kinerja DPRD dalam mencapai kepuasan masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

- 1) Secara keseluruhan, kinerja DPRD Bengkalis dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan mendapatkan total skor sebesar 7.742 tergolong baik.
- 2) Secara keseluruhan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kinerja DPRD Bengkalis secara keseluruhan mendapatkan Skor SKM 77 terletak pada interval 62,51-81,25 dengan nilai mutu pelayanan B sehingga tergolong memuaskan.
- 3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja DPRD terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis. Hasil uji korelasi pearson menunjukkan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau  $0,870 > 0,112$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Besar pengaruh antara kinerja DPRD terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis sebesar 75,8%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Herningsih, (2016). Kinerja dosen dan karyawan, pendekatan riset ditinjau dari dimensi kepemimpinan, budaya, dan lingkungan organisasi. Malang : media nusa creative
- Karianga, Hendra. (2017). Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Anwar. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung. Alfabet
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administratif (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sheth, J. N. dan Sisodia, R. S. (2012). The 4a`S Of Marketing. Creating Value For Customers, Companies And Society. New York. Routledge.
- Widya. P. Setyanto (2011) Ada Apa Dengan 10 Tahun Otonomi Daerah. Salatiga : Percik-The Foundation
- Aryati Puspasari Abady (2016) perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah: jurnal ilmu administrasi public
- Ayu, D. R. (2017, 1 3). Apa yang Dimaksud dengan Komunikasi Pembangunan. Retrieved from dictio: <https://www.google.com/>
- Rahman, S. N. (2016). Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- Aziz, Abdul. Supriyono, Bambang dan Muluk, M.R Khairul. (2013) analisis perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan system lunak (soft system) (studi pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kota malang). E-journal fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya.
- Nugroho, M. R. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Nurmala, N., & SD, Z. R. (2017). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rendra, R.( 2018 ). Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang . Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 3– Nomor 1
- Ripai, A. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sitompul. A, (2017).. Skripsi sarjana. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

- Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan. : Jurnal Ilmu Pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-ISSN: 2502-9320, 19-27.
- Zainudin & Sutjiatmi. (2018). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah : Yogyakarta.